

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh
HERLINA
Nim 105730541515



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



HERLINA

Nim 105730541515

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penelitian Pada
Program Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTTO

”Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya allah beserta orang-orang sabar”

(Q.S. AL Baqarah:113)

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan
Sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanlah
hendaknya kamu berharap.

(Q.S. AL Insyirah;6-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT, atas rahmat yang diberikan
- Ibu bapak, serta kakak dan keluarga tersayang yang takhenti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan
- Teman-teman terkasihku kelas AKUNTANSI 15.Gserta seluruh pihak yang selalu men –support dan menyertai...



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar".
 Nama Mahasiswa : Herlina
 No. Stambuk/NIM : 10573054115
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 di ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 12 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

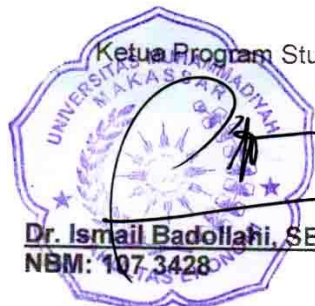
Pembimbing II,

Dr. H. Agussalim HR, SE., MM
NIDN: 0911115703

Muttiarni, SE., MM
NIDN: 0930087503

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **HERLINA, NIM : 10573 05415 15**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0182/ Tahun 1441 H/2019 M, Tanggal 13 Safar 1441 H / 12 Oktober 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

13 Safar 1441 H
Makassar,
12 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (*Jtml.*)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (*[Signature]*)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM. (*[Signature]*)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ismail badollahi, SE., MM. Ak. CA. CSP (*[Signature]*)
2. Abd. Salam, SE., M. Si. Ak. CA. CSP (*[Signature]*)
3. Andi Arman, SE., M. Si. Ak. CA (*[Signature]*)
4. Samsul Rizal, SE., MM (*[Signature]*)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina
 Stambuk : 105730541515
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan Judul : "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 12 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
03F2EAHF031526595
6000
ENAM RIBURUPIAH
HERLINA

Diketahui Oleh

Dekan,

Ismail Rosulong, SE., MM
 NBM: 903078

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si. Ak. CA. CSP
 NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT atas karunia, petunjuk, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Kantor Walikota Makassar”. Adapun tujuan penulis Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh kelulusan pada program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Teriring ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta dan sanak saudara atas segala jerih payah, dorongan dan doanya demi mencapai keberhasilan penulis dalam menempuh cita-cita. Dalam hal penyusunan skripsi ini, berbagai cobaan maupun kesulitan, rintangan dan hambatan yang penulis temui sejak pembuatan skripsi hingga menjelang penyelesaiannya tetapi dapat teratasi berkat prinsip yang disadari dari penulis, selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada;

1. Bapak Dr.H Abd Rahman Rahim, SE.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong,SE,.MM selaku Dekan Pakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi SE,.M.Si.AK.,CA.,CSP. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Agussalim HR, SE,.MM selaku Dosen Pembimbing 1, terima kasih waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Muttiarni,SE,.M,Si selaku dosen pembimbing 2, terimakasih waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan asisten dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar
8. Seluruh kepala dinas pemerintah kota makassar beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi angkatan 2015 khususnya Akuntansi 15.G yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih untuk sahabatku, Nurhambarwati dan Serlinawati, yang tak kenal lelah mendengarkan keluh kesahku dan senantiasa memberikan semangat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun kami harapkan dari semua pihak, demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabililhaq, Fastabiqul Khaerat, Wasalamu'AlaikumWr.Wb.



ABSTRAK

HERLINA. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Makassar. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Dibawah bimbingan H. Agussalim dan Muttiarni

Penelitian ini bertujuan untuk bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor walikota makassar, melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan empat variabel yaitu: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja.

sampel yang diambil adalah 50 orang responden dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang terdiri dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kota makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kusioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model regresi linear.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan anggaran berbasis kinerja yang diukur dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan evaluasi kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dalam hal ini pada Pemerintah Kota Makassar.

Kata kunci; Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

HERLINA. 2019. *The Effect of Application of Performance Based Budgeting on Accountability of Institutional Performance in Makassar City Government.* Thesis in Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar (UNISMUH). Under the guidance of H. Agussalim and Muttiarni.

This study aims to empirical evidence whether the application of performance-based budgeting affects the performance accountability of government agencies in the Makassar mayor's office, looking at the effect of the implementation of performance-based budgeting on government agency performance accountability using four variables, namely: budget planning, budget execution, budget accountability reporting and performance evaluation .

The sample taken was 50 respondents from the regional work unit (SKPD) consisting of the local government budget team (TAPD) involved in the preparation of the Makassar city government budget. Data collection is done through direct observation and surveys obtained by means of questionnaire distribution to the respondents. This study uses a linear regression model.

The result showed that, the implementatation of performance-based budgeting measured from budget planning, budget execution, budget accountability reporting had a positive effect on the accountability of the performance of government agencies while the performance of government agencies, in this case the Makassar City Government.

Keywords; *Performance Based Budgeting, Budget Planning, Budget Execution, Budget Reporting / Responsibility, Performance Evaluation, Government Agency Performance Accountability.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teoritis.....	6
a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja	6
b. Keuangan Daerah dan Pendapatan Belanja Daerah.....	8

c. Penganggaran Berbasis Kinerja	10
d. Akuntabilitas Kinerja Instansi	13
B. Tinjauan Empiris	17
C. Kerangka Konsep	21
D. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis penelitian dan Sumber Data	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Populasi dan Sampel	25
D. Variabel Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN	34
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Makassar	34
B. Visi Pemerintah Kota Makassar	34
C. Misi pemerintah kota makassar	35
D. SKPD Pemerintah Kota Makassar	35
E. Struktur Organisasi	37
F. Analisis Data	38
1. Analisis Deskriptif	38
2. Uji Kualitas Data	50
3. Uji Asumsi Klasik	53
4. Pengujian Hipotesis	58

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran – Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.1 SKPD Kota Makasar	35
4.2 Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan	39
4.3 Latar Belakan Pendidikan	40
4.4 Lama Bekerja	41
4.5 Jawaban Responden Perencanaan Anggaran.....	42
4.6 Jawaban Responden Pelaksanaan Anggaran	44
4.7 Jawaban Responden Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran.....	46
4.8 Jawaban Responden Evaluasi Kinerja	47
4.9 Jawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi	48
4.10 Hasil Uji Validitas Perencanaan Anggaran.....	50
4.11 Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Anggaran	51
4.12 Hasil Uji Validitas Pelaporan/Pertanggungjawaban	51
4.13 Hasil Uji Validitas Evaluasi Kinerja	52
4.14 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	52
4.15 Hasil Uji Reabilitas Perencanaan Anggaran.....	53
4.16 Uji Multikolinearitas	56

4.17 Uji Regresi Linear Berganda	58
4.18 Koefisien Determinasi	60
4.19 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)	61
4.20 Hasil Pengujian Parsial (Uji T)	62



DAFTAR GAMBAR

2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja	15
2.2 Kerangka Pikir	17
4.3 Histogram Dependent Variabel Akuntabilitas Kinerja.....	54
4.4 Probabiliti Plot	55
4.5 Diagram Scatter Plot	57



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat di rahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik merupakan suatu hal yang harus di ketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan di beri masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam pembedagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan pembedagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja menurut adanya output optimal atau pengeluaran yang di alokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisinsi, dan efektif.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang menekankan pencapaian hasil (*outcome*) dari program atau kegiatan yang di biayai dengan APBD yang dikaitkan dengan target kinerja terukur (Mahmudi, 2010;4). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo,2009:84).

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari belanjanya hasil publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah daerah kota Makassar, memastikan akan memasukkan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2019. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi triwulan ketiga pada tahun 2018, rata-rata SKPD yang masuk kategori rendah adalah instansi yang memiliki anggaran belanja modal cukup tinggi. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), serta Dinas Pendidikan. sebanyak 24 SKPD pemerintah kota (pemkot) Makassar realisasi belanja langsungnya rata-rata dibawah 50%, baik keuangan ataupun fisik. Bahkan dari total anggaran Rp 2,78 triliun, hanya Rp 1,16 triliun anggaran yang berhasil dikelola SKPD, dan masih ada sisa sekitar Rp 1,62 triliun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk laporan kinerja yang harus di pertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanatkan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pengukuran capaian kinerja dalam hal ini laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana kinerja setiap tahun berjalan yang telah ditetapkan dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan metode *Performance Gap*, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kegiatan meliputi *input*, *output*, *outcome*,

benefit dan *impact* yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan.

Dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Kantor Walikota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar ?
3. Bagaimana pengaruh Pelaporan pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar ?
4. Bagaimana pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar.

C. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Peneliti

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan pertanggungjawaban Anggarn terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada kantor Walikota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang telah mendalam mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Trehadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Makassar, serta sebagai referensi bagi penelitain-penelitian yang serupa di masa akan datang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para manajer dalam upaya memaksimalkan nilai kinerja pemerintah Kota Makassar sebagai tujuan utama Pemerintah Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat membiayai dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi misi dan rencana strategis organisasi (Bastian,2006:171).

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur atau indikator kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan dan merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti juga berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo 2002.105). lebih lanjut anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja anggaran hendak di capai selama periode waktu tertentu yang di nyatakan dalam ukuran financial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002.61).

Menurut Mardiasmo (2009:63) Anggaran berbasis kinerja memiliki manfaat bagi pemerintah yaitu: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan (*trade offs*). (3) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja maka diperlukan suatu alat pengukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja. Selain itu juga diperlukan sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran. Dalam adanya pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga. Tidak percaya dan wujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga pemerintahan yang baik dapat bersama-sama diwujudkan.

2. Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. (Halim 2007:19), mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang/undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut keputusan menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Semua hak dan pengelolaan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2007:20) ada dua yaitu:

a. Keuangan daerah yang dikelola langsung meliputi:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- 2) Barang-barang inventaris milik daerah

b. Kekayaan daerah dipisahkan menjadi badan usaha milik daerah (BUMN)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah adapun arti dari keuangan daerah sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim. 2007:20). Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.

Menurut Halim (2007:16) berpendapat bahwa APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 Tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain

menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Sedangkan definisi (anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), juga ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Penganggaran Berbasis Kinerja

a. perencanaan anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai disistem perencanaan pembangunan nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan

anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004.

b. Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) ditetapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) dengan persetujuan sekretaris daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya daripada umpan balik dari pengalaman yang sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang di berikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. (b). menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. (c). memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. (d). menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah dalam pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

c. pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup:

- 1) Laporan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- 2) Neraca satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- 3) Catatan atas laporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

4. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

1) Defenisi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan(LAN dan BPKP 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisas, dalam mengelolala sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik sumberdaya dalam hal ini merupakan saranana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sember daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks Negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan,uang dan kekuasaan hokum dan politik.

Keputusan kepala LAN No.239/1X/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja insansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan-pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

2) Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga akuntansi Negara, pelaksanaan LAKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya komitmen dan pimpinan dari seluruh staf instansi yang bersangkutan
- b) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- d) Bereorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e) Jujur, objektif, transparan dan akurat

- f) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

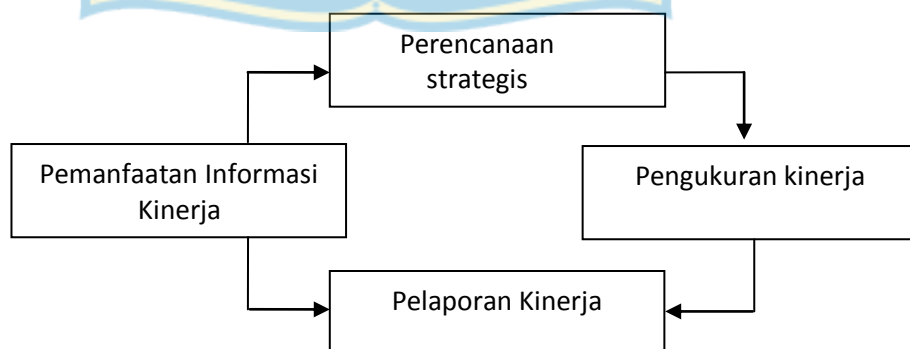
3) Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Penempatan perencanaan strategik
- b) Pengukuran kinerja
- c) Pelaporan kinerja
- d) Pemanfaatan informasi bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 siklus akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber : pusdiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta mendapatkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap bulan.

Rencana kerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta stratejik untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kineja dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja tersebut merupakan capain kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukanya data yang diperlukanya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja yaitu, tatanan, instrument, dan pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan pada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah telah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	VARIABEL	HASIL
1	Syaripuddin, sutriana Basri (2017)	Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kediri)	Metode penelitian kuantitatif	Variabel independen dan variabel dependen	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kediri dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya.
2	J.R. Patiruhu. Stenley J.Ferdinandus. welmin Marlo Komul (2018)	Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan (studi empiris pada badan pencarian dan pertolongan)	Metode penelitian kuantitatif	Variabel dependen dan variabel independen	Partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, evaluasi anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif

					signifikan terhadap kinerja manajerial , perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial
3	Dewi kurniasari, dedeh kurniasari, m. Sandy marta (2017)	Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bandung Barat	Metode penelitian kuantitatif	Variabel menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas	Hasil menunjukkan terdapat pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Analisis berbasis kinerja berpengaruh secara persial dan simultan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada DPPKAD kabupaten bandung barat.
4.	Ni Lu Putu Uttari Premananda dan Ni Made Yenni Latrin (2017)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Denpasar	Metode penelitian kuantitatif		Secara persial maupun serentak akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Pertimbangan dan masukan bagi SKPD kota Denpasar yang dapat di sarankan yakni lebih memberi perhatian pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran kinerja anggaran berkonsep VFM di setiap SKPD kota Makassar.

5.	Muhammad F.E.Saerang, David P.E. Searang, Winston Pontoh	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Eektivitas Pengendalian Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bitung	Metode penelitian analisis regresi sederhana (kuantitatif)	Variabel independen dan variabel dependen	Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian kinerja pada dinas pendidikan kota bitung
6.	Nila Aprilia	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (<i>performance based budgeting</i>) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	Metode penelitian kuantitatif	Variabel dependen dan variabel independen	Perencanaan anggaran pada satuan kerja (SKPD) kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu dan pelaksanaan, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja pada satuan kerja perangkat daerah terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah kota Bengkulu
7.	Anggi Veronisa Claura	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Bengkulu)	Metode analisis berganda		Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Hal ini di karenakan terdapat beberapa indikator kompetensi aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana dengan baik.

8.	Yohanes Y.Subyanto	Pengaruh Penaerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokorto	Metode penelitian kuantitatif	Variabel bebas dan terikat	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkup badan perencanaan dan pembangunan kota (BAPPEKO) Kota Mojokorto sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga tidak terjadi pemborosan yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada (BAPPEKO).
9	Dafitra Pratama (2014)	Pengaruh penganggaran berbasis kinerja, Pengawasan Prefentif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Di kabupaten Pelalawan)	kuantitatif	Variabel dependen dan variabel independen	Variabel pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas terhadap pengendalian anggaran. Dan variabel pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

C. Kerangka pikir

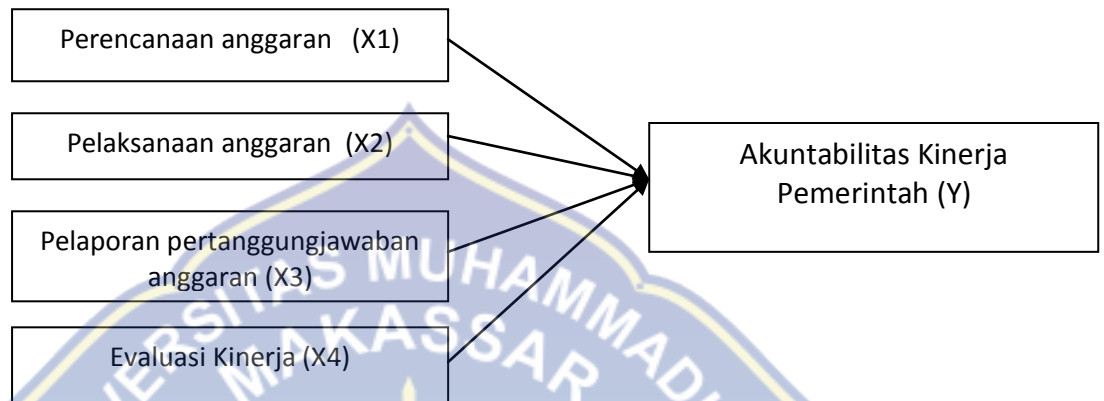
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang

menjadi wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incremental* menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang bereorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat pada visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mempunyai program prioritas adalah program yang berorientasi pada kepentingan publik. Visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang merupakan elemen anggaran berbasis kinerja menyebabkan anggaran berbasis kinerja perlu menterjemahkan tujuan dalam sasaran yang lebih terukur, sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan output terukur.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan (Bastian. 2006:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatkan skema kerangka pikir menggunakan Analisis Regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dibuat dalam bentuk skema berikut ini:



Gambar 2.2: Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyajikan hipotesis yaitu:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Makassar
2. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Makassar
3. Pertanggungjawaban pelaporan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Kota Makassar
4. Evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Kota Makassar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupa angka yang di peroleh dari jawaban yang diberikan koresponden kemudian dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik (Siregar,2014).

Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang akan dibagikan kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap kuisisioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisisioner.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang dipilih, penulis melakukan penelitian pada pemerintah kota Makassar yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani No.2 Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 22 juli s/d 15 agustus 2019.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (sugiono, 2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Badan keuangan dan Aset Daerah kota makassar khususnya bagian anggaran dan akuntansi yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) responden.

2. Sampel

Menurut sugiyono (2013:81) sampel diartikan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden, metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* karena responden yang dipilih hanya berkaitan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

D. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja serta variabel terikatnya adalah Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi *input*, *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan empat variabel sebagai berikut:

a). Perencanaan Anggaran (X1)

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.

b). pelaksanaan Anggaran (X2)

Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *outputnya* dalam sistem akuntansi keuangan.

c). Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (X3)

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

d). Evaluasi Kinerja (X4)

Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut.

Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel independen digunakan kuesioner dengan menggunakan skala likert, yaitu skor 5 (SS= sangat setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N= netral), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS= sangat tidak setuju).

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dengan menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS= sangat setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N= netral), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS= sangat tidak setuju).

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Adapun isi kuisisioner sebagai instrument penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas:
 - a. Propil responden, meliputi: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja.
 - b. Daftar pernyataan kuisisioner, meliputi: pertanyaan mengenai variabel penelitian. Variabel menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat variabel merupakan alat dan sarana untuk melakukan pengukuran.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, literatur, atau artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis untuk melakukan pembahasan.
3. Mengakses *websaite* dan situs-situs, digunakan untuk mencari websaite maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

F. Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang data dari responden yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuisisioner. Kemudian data data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung presentasinya (Nugroho, 2011:22).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kusioner. Suatu kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator total dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output person Corelation (Ghozali, 2005). Dengan kinerja jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ item pertanyaan / pernyataan dikatakan valid.

b. Uji reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya koesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu koesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reabilitas dimaksudkan untuk menguji konsisten atau tidaknya responden terhadap koesioner-koesioner penelitian.

c. Uji Asumsi Klasik

1). Penyajian Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Kedua, dengan *normal probability plot*, yaitu distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali,2009:107).

2). Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Apabila *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas. Apabila ternyata terdapat multikolinearitas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali,2009:25).

3). Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan SPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentised. Dasar analisis:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebarkemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
 - b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
- 4) Analisis regresi linear berganda

Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut (Nugroho, 2011:92), sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

Y :Akunabilitas Kinerja

a : konstanta

.X₁ :Perencanaan anggaran

X_2 :Pelaksanaan Anggaran

X_3 :Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

X_4 :Evaluasi Kinerja

koefisien Determinasi (R^2)

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R^2) yang merupakan yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (Ghozali, 2009:15)

5) Pengujian Hipotesis

a) Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (2001:99).

Berdasarkan hipotesis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja. Jika probabilitas $>0,05$ maka ditolak dan jika probabilitas $<0,05$ maka diterima

b) Pengujian parsial (uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Nugroho, 2011:100).

Apabila hipotesis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja Jika probabilitasnya $>0,05$ ditolak dan Jika probabilitas $<0,05$ diterima



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonomi dalam wilayah Negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat umum.

Pemerintah kota Makassar sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga atau instansi otonom berdasarkan peraturan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. Visi Pemerintah Kota Makassar

Visi organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut keamanan organisasi dibawah dan diarahkan agar dapat berkaya secara konsisten dan produktif. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2014-2019 adalah Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019.

C. Misi Pemerintah Kota Makassar

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka bada pengelolaan keuangan dan asset daerah memiliki misi:

1. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu
2. Meningkatkan akurasi penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).

D. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah kota makassar 30 Sataun Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari dinas, badan, kantor dan kecamatan yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Makassar

No.	Instansi/Unit Kerja
1	Sekretariat Dearah Kota Makassar
2	Secretariat DPRD
3	Inspektorat Kota Makassar
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	BAPPEDA Kota Makassar
6	Kantor Kementrian Depertemen Agama
7	DP Air Minum Kota Makassar
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Pertamanan dan keersihan

10	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
11	Dinas Pekerjaan Umum
12	Dinas Pendapatan Daerah
13	Dinas Komunikasi dan Informasi
14	Dinas Pendidikan
15	Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
17	Dinas Perindustrian, perdagangan dan modal
18	Dinas Kesehatan
19	Dinas Sosial
20	Dinas Tenaga Kerja
21	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat
23	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri
25	Badan Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data
26	Badan Pemberdayaan Perempuan
27	Badan pemberdayaan Perempuan dan P.A
28	Badan Kepegawaian
29	Badan Koperasi dan Usaha Kecil
30	Badan Pelayanan Adminitrasi Perizinan dan Penanaman modal

E. Struktur Organisasi



Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Subbagian perlengkapan
 - c. Subbagian keuangan
3. Bidang anggaran, terdiri atas:
 - a. Subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran
 - b. Subbidang pengendalian anggaran
4. Bidang perbendaharaan, terdiri atas:
 - a. Subbidang badan pengelolaan kas daerah

- b. Subbidang perbendaharaan dan gaji
- 5. Bidang akuntansi, terdiri dari:
 - a. Subbidang pembukuan
 - b. Subbidang pelaporan
- 6. Bidang Aset, terdiri dari:
 - a. Subbidang mutasi dan inventarisasi aset
 - b. Subbidang pengadaan dan pemanfaatan aset
- 7. Unit pelaksanaan teknis
- 8. Kelompok jabatan fungsional

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat data interpretasi yang diperlukan. Selain itu analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data diperoleh dari penyebaran kusioner yang dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden. Dimana responden memberikan pernyataan dan penilaian atas ztas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan selanjutnya dihitung presentasinya.

a. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kusioner sebanyak 50 eksemplar. Untuk memperoleh gambar tentang karakteristik responden

yang akan diteliti, dilakukan pengelolaan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Data yang merupakan jawaban responden dianalisis dengan bantuan program SPSS 25 dengan teknik analisis data. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

- a) Jenis kelamin dan Latar Belakan Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.2
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Responden

NO	Karakteristik	F	Jumlah Responden	Tingkat Pendidikan				
				SMA	Diploma	S1	S2	S3
1	Laki-laki	F	35	3	8	15	7	2
		%	70,0	6,0	16,0	30,0	14,0	4,0
2	Perempuan	F	15	2	5	5	3	-
		%	30,0	4,0	10,0	10,0	6,0	-
Total		F	50	5	13	20	10	2
		%	100	10,0	26,0	40,0	20,0	4,0

Data diatas pada tabel 4.2 menunjukkan jumlah responden laki-laki sebanyak 35 orang atau sekitar 70,0% lebih besar dibandingkan dengan jumlah responden perempuan yang hanya berjumlah 15 orang atau sekitar 30,0%. kemudian dari jumlah 50 responden sebanyak 5 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya sekolah menengah keatas (SMA). Dan 13 orang responden yang tingkat pendidikanya diploma (D3). Dan 20 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya strata 1 (S1). Dan 10 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya strata 2 (S2). Dan 2 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya strata 3 (S3). Sedangkan dari jumlah 35 orang responden Laki-laki sebanyak 3 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA. Dan 8 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya Diploma. Dan 15 orang responden yang tingkat

pendidikan terakhirnya S1. Dan 7 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya S2. Dan 2 orang responden yang tingkat pendidikan terakhirnya S3.

b) Latar Belakan Responden

Tabel 4.3
Latar Belakan bidang keahlian Responden

No	Latar Belakan Pendidikan Responden	F	Jumlah
1	Ekonomi	F	35 orang
		%	70,0
2	Hukum	F	2 orang
		%	4,0
3	Teknik	F	3 orang
		%	6,0
4	Sosial	F	6 orang
		%	12,0
5	Lainya	F	4 orang
		%	8,0
Total			50 orang

Dari tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan latar belakan pendidikan Ekonomi sebanyak 35 orang atau 70,0%, untuk latar belakan hukum sebanyak 2 orang atau 4,0%. Untuk latar belakan pendidikan teknik sebanyak 3 orang atau 6,0%. Dan latar belakan pendidikan sosial sebanyak 6 orang atau 12,0%. Kemudian untuk latar belakan pendidikan lainya sebanyak 4 orang atau 8,0%.

c) Lama Bekerja

Tabel 4.4
Lama Bekerja Responden

No	Lama bekerja (tahun)	F	Jumlah
1	1 – 5 Tahun	F	20 orang
		%	40,0
2	6 – 10 Tahun	F	10 Orang
		%	20,0
3	11 – 15 Tahun	F	10 orang
		%	20,0
4	16 – 20 Tahun	F	3 orang
		%	6,0
5	>21 Tahun	F	7 orang
		%	14,0
Total			50 orang

Berdasarkan dari tabel 4.4 diatas, menunjukkan jumlah responden yang paling lama bekerja yang lebih dari 21 tahun yaitu sebanyak 7 orang ini menunjukkan resoponden yang terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran adalah responden yang paling lama kerjanya.

2. Analisis Jawaban Responden

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel perencanaan anggaran (X1), Pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), evaluasi kinerja (X4), dan variabel akuntabilitas kinerja (Y), penelitian menggunakan 5 skala liker yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5= Sangat Tidak Setuju

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan variabel dependen dan independen yang terdapat dalam kusioner, yaitu:

a. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

a) Deskripsi Data Variabel Perencanaan Anggaran (X1)

Tabel 4.5

Jawaban Responden Untuk Perencanaan Anggaran (X1)

No	Butir Kusioner	F	SS	S	N	TS	STS	Skor	Rata-rata
			5	4	3	2	1		
1	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program pemerintah kota makassar yang telah dicapai	F	0	15	35	0	0	165	3,30
		%	0	30,0	70,0	0	0	100	
2	RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaanya	F	0	20	30	0	0	170	3,40
		%	0	42,0	58,0	0	0	100	
3	Dkumen KUA berdasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut	F	0	21	29	0	0	171	3,42
		%	0	42,0	58,0	0	0	100	
4	SKPD dalam hal perencanaan anggaranya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD	F	2	18	30	0	0	172	3,42
		%	4,0	34,0	62,0	0	0	100	
5	Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pada anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD	F	4	12	34	0	0	170	3,36
		%	8,0	24,0	70,0	0	0	100	
6	Adanya sikronisasi program dan kegiatan antara SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	F	7	20	23	0	0	184	3,68
		%	14,0	40,0	46,0	0	0	100	

7	Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja	F	7	28	15	0	0	192	3,84
		%	14,0	56,0	30,0	0	0	100	
8	Dalam penyusunan RKA-SKPD, APBD serta pengawasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD dan SKPD itu sendiri	F	8	33	9	0	0	199	3,98
		%	16,0	66,0	18,0	0	0	100	
9	PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPAD menjadi raperda APBD untuk dibahas dan diperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi	F	11	28	11	0	0	200	4,00
		%	22,0	56,0	22,0	0	0	100	
10	Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota	F	0	20	30	0	0	170	3,40
		%	0	40,0	60,0	0	0	100	
Total jawaban responden			39	215	246	0	0		
Total									35,80%

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.5 terlihat bahwa jawaban responden tentang perencanaan anggaran memiliki nilai yang baik yaitu sebesar 35,80%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang memiliki skor 5 sebanyak 39 jawaban, Responden yang memiliki skor 4 sebanyak 215 jawaban, responden yang memiliki skor 3 sebanyak 246 jawaban responden yang memiliki skor 2 sebanyak 0 (0%), dan responden yang memiliki skor 1 sebanyak 0 jawaban (0%).

Berdasarkan data skor total distribusi frekuensi diatas jawaban terhadap 10 indikator pertanyaan-pertanyaan yang Diajukan tentang perencanaan anggaran , maka jawaban responden atas ke 10 item pernyataan tergolong dalam Range baik. Ini artinya bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sangat besar dan ke 10 indikator tersebut yang memiliki skor terendah adalah indikator ke 1 dengan jumlah skor 165 (3,30%), yaitu tentang dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program pemerintah kota makassar yang telah dicapai. Sedangkan yang memiliki skor tertinggi adalah indikator 9 dengan jumlah skor 200 (4,00), yaitu PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi raperda APBD untuk dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi.

b) Deskripsi data Variabel Pelaksanaan Anggaran (X2)

Tabel 4.6

Jawaban responden untuk pelaksanaan anggaran X2

No	Butir Kusioner	F	SS	S	N	TS	STS	Skor	Rata-rata
			5	4	3	2	1		
1	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan rencana anggaran kas yang telah disahkan	F	4	25	21	0	0	183	3,66
		%	8,0	50,0	42,0	0	0	100	
2	Dokumen anggaran kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD	F	0	36	14	0	0	186	3,72
		%	0	72,0	28,0	0	0	100	
3	SKPD dalam pelaksanaan anggaranya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan anggaran kas	F	4	25	21	0	0	183	3,66
		%	8,0	50,0	42,0	0	0	100	
Total jawaban responden			8	86	56	0	0		
Total									11,04%

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jawaban responden tentang pelaksanaan anggaran memiliki nilai yang baik yaitu sebesar 11,04%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang memiliki skor 5 sebanyak 8 jawaban, Responden yang memiliki skor 4 sebanyak 86 jawaban, responden yang memiliki skor 3 sebanyak 56, respnden yang memiliki skor 2 sebanyak 0 jawaban (0%), dan responden yang memiliki skor 1 sebanyak 0 jawaban (0%).

Berdasarkan data skor total distribusi frekuensi atas jawaban terhadap 3 indikator pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang pelaksanaan anggaran, maka jawaban responden atas ke tiga item pertanyaan tergolong dalam Range baik. Ini artinya bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sangat besar/tinggi. Dari ketiga indikator tersebut yang memiliki skor terendah adalah indikator 1 dan 3 yaitu dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan rencana anggaran kas yang telah disahkan dan SKPD dalam pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai jumlah tercantum dalam dokumen DPA dan anggaran kas, dengan jumlah skor 183 sedangkan yang memiliki indikator tertinggi yaitu indikator 2 yaitu dokumen anggaran kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD dengan jumlah skor 186.

c) Deskripsi Data Variabel Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3).

Tabel 4.7

Jawaban responden untuk pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3)

No	Butir Kusioner	F	SS	S	N	TS	STS	Skor	Rata-rata
			5	4	3	2	1		
1	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang	F	4	22	24	0	0	180	3,60
		%	8,0	44,0	48,0	0	0	100	

	terjadi								
2	Laporan keuangan SKPD dan pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan	F	8	19	25	0	0	183	3,66
		%	16,0	38,0	50,0	0	0	100	
3	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik	F	2	23	25	0	0	187	3,74
		%	4,0	46,0	50,0	0	0	100	
Total jawaban responden			13	74	63	0	0		
TOTAL									11,00%

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jawaban responden tentang pelaporan/pertanggungjawaban anggaran memiliki nilai yang baik yaitu sebesar 11,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden yang memiliki skor 5 sebanyak 13 jawaban, responden yang memiliki skor 4 sebanyak 74 jawaban, responden yang memiliki skor 3 sebanyak 63 jawaban, responden yang memiliki skor 2 sebanyak 0 jawaban, dan responden yang memiliki skor 1 sebanyak 0 jawaban.

Berdasarkan data skor total distribusi frekuensi atas jawaban terhadap 3 indikator pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Maka jawaban responden atas ketiga item pertanyaan tergolong dalam Range baik. Ini artinya bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sangat besar/tinggi. Dari ketiga indikator tersebut yang memiliki skor tertinggi adalah indikator 3 dengan total skor 187, yaitu pertanggungjawaban terhadap APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan indikator yang memiliki skor terendah adalah indikator 1 dengan total skor 180.

d) Deskripsi data variabel Evaluasi kinerja (X4)

Tabel 4.8
Jawaban responden untuk Evaluasi Kinerja (X4)

No	Butir Kusioner	F	SS	S	N	TS	STS	Jumlah	Skor
			5	4	3	2	1		
1	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan	F	3	26	21	0	0	182	3,64
		%	3	72,0	42,0	0	0	100	
2	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efesiensi dan efektifitas, apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan	F	0	36	14	0	0	186	3,72
		%	0	72,0	28,0	0	0	100	
3	setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya Reward yang diberikan kepada skpd yang mencapai target anggaran	F	3	26	21	0	0	182	3,64
		%	6,0	52,0	42,0	0	0	100	
F			6	66	78	0	0		
Jumlah									11,00%

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jawaban responden tentang evaluasi kinerja memiliki nilai yang baik yaitu sebesar 11,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang memiliki skor 5 sebanyak 6 jawaban, responden yng memiliki skor 4 sebanyak 66 jawaban, responden yang memiliki skor 3 sebanyak 78 jawaban, responden yang memiliki skor 2 sebanyak 0 jawaban, dan responden yang memiliki skor 1 sebanyak 0 jawaban.

Berdasarkan data skor total distribusi frekuensi atas jawaban terhadap 3 indikator pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada responden tentang evaluasi kinerja, maka jawaban responden atas ketiga item pertanyaan tergolong dalam Range baik. Dari ketiga indikator tersebut yang memiliki skor terendah adalah indikator 1 dan 3 dengan total skor 182. Sedangkan yang memiliki skor tertinggi adalah indikator 2 dengan total skor 186.

b. Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 4.9
Jawaban Responden Untuk Akuntabilitas Kinerja (Y)

No	Butir Kusioner	F	SS	S	N	TS	STS	Jumlah	Skor
			5	4	3	2	1		
1	Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD	F	8	28	14	0	0	192	3,86
		%	14,0	54,0	28,0	0	0	100	
2	Urusan keuangan diserahkan kepada pegawai yang jujur yang tidak memiliki catatan pernah berbuat curang	F	8	32	10	0	0	198	3,96
		%	16,0	64,0	20,0	0	0	100	
3	Persoalan anggaran daerah harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tugas masing-masing	F	13	27	10	0	0	203	4,06
		%	16,0	54,0	20,0	0	0	100	
4	Terselenggaranya anggaran keuangan ditentukan oleh produktivitas pegawai daerah	F	0	21	29	0	0	171	3,42
		%	0	42,0	58,0	0	0	100	
5	Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah	F	4	24	22	0	0	185	3,64
		%	8,0	48,0	44,0	0	0	100	
6	Keuangan daerah ditata sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan waktu yang cepat	F	2	19	29	0	0	173	3,46
		%	4,0	38,0	58,0	0	0	100	
7	Masayarakat tlah merasakan dampak positif dari keberhasilan anggaran daerah	F	5	24	21	0	0	182	3,62
		%	10,0	48,0	42,0	0	0	100	

8	Motivasi pegawai menjadi langkah positif guna menjaga kinerja	F	7	20	23	0	0	184	3,48
		%	14,0	40,0	46,0	0	0	100	
9	Petugas keuangan daerah harus mengusahakan harus mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran	F	2	34	14	0	0	187	3,76
		%	4,0	68,0	28,0	0	0		
Total jawaban Responden			48	229	173	0	0		
Total									33,46%

Sumber : data primer, olahan 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jawaban responden tentang Akuntabilitas Kinerja (Y) memiliki nilai yang baik yaitu sebesar 33,46%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang memiliki skor 5 sebanyak 48 jawaban, responden yang memiliki skor 4 sebanyak 229 jawaban (50,8%), Responden yang memiliki skor 3 sebanyak 173, responden yang memiliki skor 2 sebanyak 0 jawaban, dan responden yang memiliki skor 1 sebanyak 0 jawaban.

3. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan pada kusioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Untuk mengetahui validitas pertanyaan-pertanyaan dari setiap variabel, maka digunakan *correlation ivariatbe* dengan kriteria:

1. Jika nilai $<0,05$ = tidak valid
2. Jika nilai $>0,05$ = valid

Signifikan dilihat dari kolom total dan setiap item pertanyaan atau pernyataan.

1. Penerapan Anggaran

a. Perencanaan Anggaran (X1)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Perencanaan Anggaran (X1)
Inter-item correlation

Pertanyaan	Corrected item total correlation (<i>r</i> hitung)	R_{tabel}	Validitas
1	0,496	0,05	Valid
2	0,714	0,05	Valid
3	0,747	0,05	Valid
4	0,699	0,05	Valid
5	0,577	0,05	Valid
6	0,594	0,05	Valid
7	0,502	0,05	Valid
8	0,468	0,05	Valid
9	0,571	0,05	Valid
10	0,714	0,05	Valid

Sumber : data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas perencanaan anggaran (X1), variabel dinyatakan valid hal ini dilihat dari R_{tabel} masing-masing menunjukkan angka diatas 0,05

b. Pelaksanaan anggaran X2

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Anggaran X2
Inter-item correlation

Pertanyaan	Corrected item total correlation (<i>r</i> hitung)	R_{tabel}	Validitas
1	0,924	0,05	Valid
2	0,533	0,05	Valid
3	0,924	0,05	Valid

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan hasil uji validitas pelaksanaan anggaran (X2), variabel dinyatakan valid hal ini dilihat dari R_{tabel} masing-masing menunjukkan angka diatas 0,05

c. Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran (X3)

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran X3
Inter-item Correlation

Pertanyaan	Corrected item total correlation (<i>r</i> hitung)	R_{tabel}	Validitas
1	0,904	0,05	Valid
2	0,930	0,05	Valid
3	0,657	0,05	Valid

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan hasil uji validitas pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), variabel dinyatakan valid hal ini dilihat dari R_{tabel} masing-masing menunjukkan angka diatas 0,05

d. Evaluasi Kinerja

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Evaluasi Kinerja X4
Inter-item Correlation

Pertanyaan	Corrected item total correlation (<i>r</i> hitung)	R_{Tabel}	validitas
1	0,917	0,05	Valid
2	0,537	0,05	Valid
3	0,197	0,05	Valid

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan hasil uji validitas evaluasi kinerja (X4), variabel dinyatakan valid hal ini dilihat dari R_{tabel} masing-masing menunjukkan angka diatas 0,05

2. Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Y
Inter-item Correlation

Pertanyaan	Corrected item total correlation (<i>r</i> hitung)	R_{tabel}	validitas
1	0,579	0,05	Valid
2	0,620	0,05	Valid
3	0,670	0,05	Valid
4	0,489	0,05	Valid
5	0,557	0,05	Valid
6	0,246	0,05	Valid
7	0,810	0,05	Valid
8	0,726	0,05	Valid
9	0,547	0,05	Valid

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan hasil uji validitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), variabel dinyatakan valid hal ini dilihat dari R_{tabel} masing-masing menunjukkan angka diatas 0,05.

Berdasarkan tabel uji validitas penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari 4 variabel yaitu Perencanaan anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran (X3), Evaluasi Kinerja (X4), dan variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) diatas dapat disimpulkan bahwa semua item untuk pertanyaan-pertanyaan masing-masing variabel dinyatakan valid.

Sesuai dengan tujuan dilakukanya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan-pertanyaan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kusioner penelitian yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kusioner yang di gunakan untuk mengukur variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengukur reabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $alpha > 0,05$

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability statistics		
Keterangan	Cronbach's Alpha	No of items
Perencanaan anggaran	0,799	10
Pelaksanaan anggaran	0,741	3
Pelaporan pertanggungjawaban anggaran	0,842	4
Evaluasi kinerja	0,829	4
Akumntabilitas kinerja	0,744	10

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliable atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi hal ini dibuktikan nilai koefisien alpha lebih dari 0,05 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat dihandalkan atau dipercaya

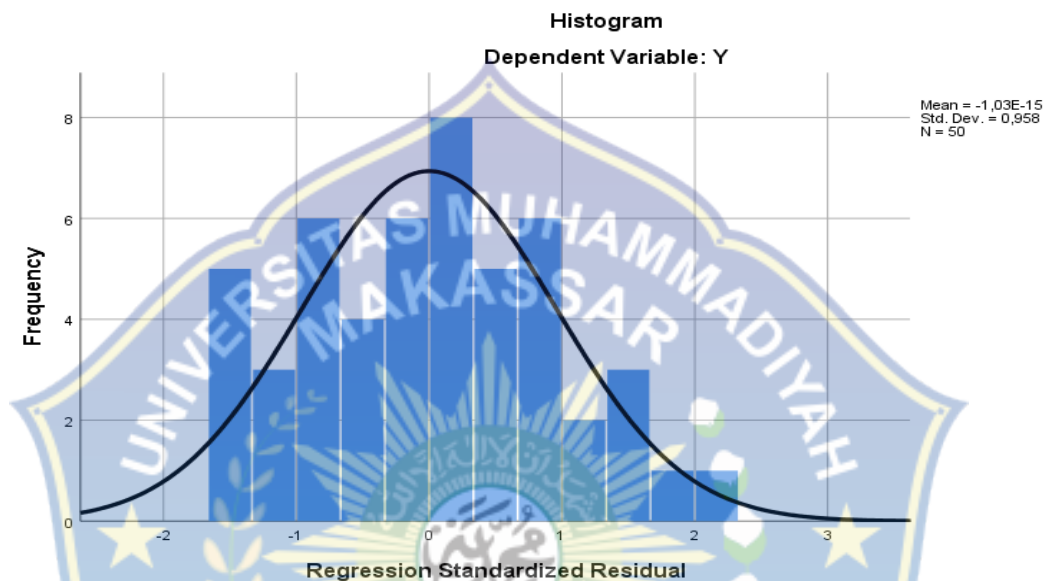
5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

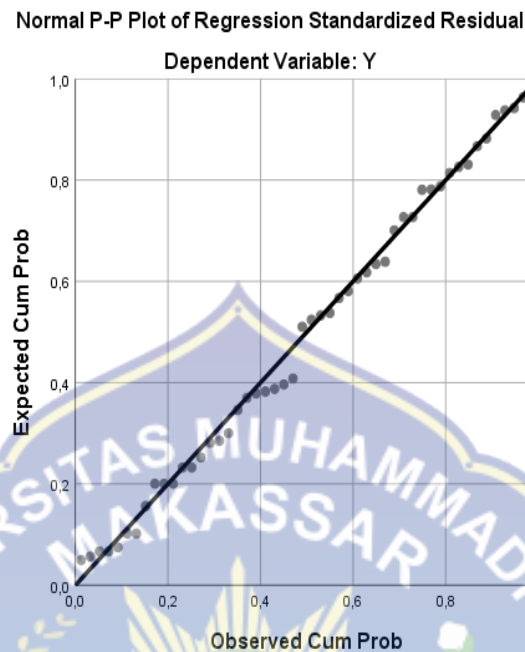
Gambar 4.2



Dengan melihat grafik histogram dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Model yang lebih akurat untuk melihat apakah data terdistribusi adalah *normal probability plot*

Gambar 4.3



Dengan melihat grafik normal plot, kita dapat melihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya Normal.

Dengan melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi Normalitas.

b. Uji multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk melakukan uji multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai vif (variance inflation faktors). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.16
Uji Multikolinearitas
coefficients

Model	Colinearity statistycs	
	Tolerance	VIF
(constant)		
Perencanaan anggaran	,718	1,393
Pelaksanaan anggaran	,016	63,251
Laporan pertanggungjawaban	,207	4,838
Evaluasi kinerja	,018	55,341

Dependen variabel akuntabilitas kinerja

Berdasarkan dari tabel diatas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja.

c. Uji Heterokedastisitas

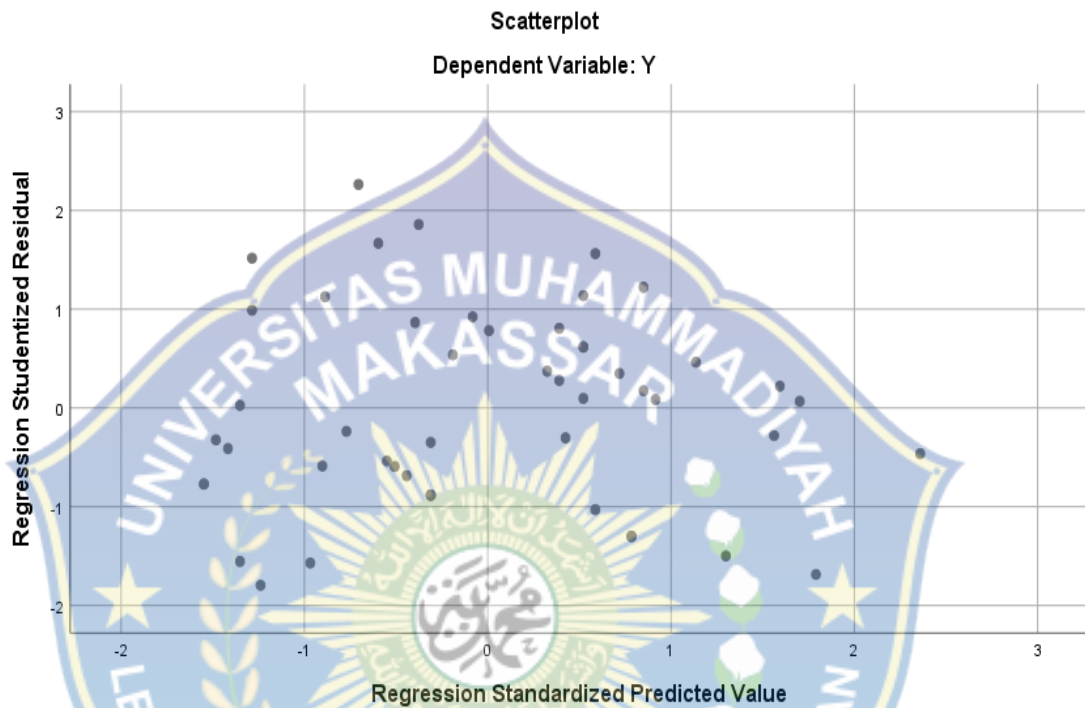
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas, metode yang digunakan adalah metode *chart (diagram scatterplot)*. Jika :

1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Gambar 4.4
Gambara scatterplot



Berdasarkan diagram *scatterplot* diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y , ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

d. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda

Tabel 4.17
Uji Regresi linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Standar Error
(Constan)	10,743	3,342
Penerapan anggaran	,171	0,96
Pelaksanaan anggaran	,431	1,596
Pelaporan pertanggungjawaban	1,106	,388
Evaluasi kinerja	-,029	1,558

a. Dependen variabel : akuntabilitas kinerja

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus sebagai berikut:

$$Y = 10,743 + 0,171X_1 + 0,431X_2 + 1,106 X_3 - 0,029X_4$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 10,743 hal ini berarti jika tidak ada perubahan penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran (X_1), Pelaksanaan anggaran (X_2), Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X_3), dan evaluasi kinerja (X_4) yang mempengaruhi, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terjadi pada pemerintah kota makassar sebesar 10,743 sedangkan hasil uji

regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien perencanaan anggaran (X1) sebesar 0,171 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian keuangan (Y). hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan perencanaan anggaran suatu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,171 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
2. Nilai koefisien pelaksanaan anggaran (X2) sebesar 0,431 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pelaksanaan anggaran satu satuan maka variabel akuntabilitas instansi pemerintah naik sebesar 0,431, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3) sebesar 1,106 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran satu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 1,106 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
4. Nilai koefisien evaluasi kinerja (X4) sebesar -0,029 berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan evaluasi kinerja satu

satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar -0,029 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

2. Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,656	,625	1,965

a. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja , perencanaan anggaran , pelaporan pertanggungjawaban , pelaksanaan anggaran

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *Rsquare* yang diperoleh sebesar 0,656 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota makassar dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja sebesar 47,7% dan sisanya 52,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat nilai koefisien yang tinggi menunjukkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang juga tinggi yaitu sebesar 47,7%.

3. Pengujian Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Simultan (uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	330,667	4	82,667	21,410	,000 ^b
	Residual	173,753	45	3,861		
	Total	504,420	49			

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

b. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja , perencanaan anggaran , pelaporan pertanggungjawaban , pelaksanaan anggaran

Sumber: data primer, olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 21,410. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $<0,05$, maka diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari indikator perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara serempak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan $F = 21,410 < 0,05$. Sehingga jika perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersma-sama meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga meningkat.

4. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.

Tabel 4.20

Hasil pengujian parsial (UJI t)

MODEL	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	10,743	3,342		3,214	,002
PA	,171	,096	,184	1,785	,081
PAA	,431	1,596	,188	,270	,789
PPA	1,106	,388	,549	2,851	,007
EK	-,029	1,558	-,012	-,019	,985

Sumber: data primer, olahan 2019.

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji T adalah :

- a) Perencana anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,081 > 0,05$ dan hipotesis ditolak.
- b) Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. Hal ini dibuktikan tingkat signifikansi yang diperoleh $0,789 > 0,05$ dan hipotesis ditolak.
- c) Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,007 < 0,05$ dan hipotesis ditolak.

- d) Evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan yang diperoleh $0,985 > 0,05$ dan hipotesis ditolak.

5. Pembahasan

a. Hasil Uji Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara perencanaan anggaran sebagai (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel (Y) menunjukkan bahwa bahwa t hitung sebesar 1,785 dengan nilai signifikan sebesar $0,081 < 0,05$ dari hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,171 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan tidak baik atau kurang baik, sehingga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan perencanaan yang baik. Karna, perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi

b. Hasil uji pengaruh pelaksanaan anggaran (X2) terhadap akuntabilitas kinerja (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara pelaksanaan anggaran sebagai (X2) Terhadap akuntabilitas kinerja instansi sebagai variabel (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,270 dengan nilai signifikan sebesar $0,081 > 0,05$ dan hasil uji regresi berganda

menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,431 menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaksanaan anggaran yang dilakukan semakin baik dan benar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi tidak pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena kemungkinan variabel pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran.

c. Hasil Uji Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara pelaporan/pertanggungjawaban anggaran kinerja sebagai (X3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,851 dengan nilai signifikan sebesar $0,007 > 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,106 menunjukkan bahwa variabel pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan efektifitas pengendalian keuangan perlu dilakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

d. Hasil Uji Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara evaluasi kinerja sebagai (X4) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar (-0,019) dengan nilai signifikan sebesar $0,985 > 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,029 menunjukkan bahwa variabel evaluasi kinerja anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika evaluasi kinerja yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi pengaruhnya tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi karena kemungkinan variabel evaluasi kinerja dipengaruhi oleh variabel pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Brdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengaruh penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran

berpengaruh positif dan signifikan, dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin, sutriana Basri (2014) dengan judul Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kediri. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Makassar.
2. Berdasarkan uji regresi linear berganda, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah kota makassar sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan anggaran pemerintah kota makassar sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden



Daftar Pustaka

- Anggi Veronisa Claura. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bengkalis). Pekanbaru: *Faculty of Economics Riau University*.
- Dewi Kurniasari, Kurniasari, Marta. 2017. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Anggaran di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Bandung: *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dafitra Pratama, 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri). Pekanbaru: Universitas Riau kampus Bina Widiasimpan Baru pekanbaru.
- Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- J.R.Patiruhu. Stenley J.Ferdinandus Welmin Marlo Komul. 2018. Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan (studi empiris pada badan pencarian dan pertolongan). Pascasarjana *Universitas pattimura..*
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntansi Kinerja Dan Good Gopernance*, Jakarta: Penerbit LAN.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Muhammad F.Syawie, David P.E.Saerang, Winston pontoh. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja pada Pendidikan Kota Bitung. Manado. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Nila Aprilia, Melfariza. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Universitas Bengkulu*.
- Ni Lu Putu Uttari Premananda, Ni Made Yenni Latrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *Universitas Udayana (UNUD)*. Bali.
- UU No.25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- Octariani, Akram, Animah. 2017. Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD. Mataram. Universitas Mataram.

Republik Indonesia.Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia.Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sugi Arti, Agung. (2010). Pengaruh Penerapan Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan kota Depok Tesis. Jakarta: program paska sarjana *Universitas Gunadarma*.

Syaripuddin, satriana.2017.Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (studi pada badan penegelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kendari). Kendari. *Universitas halu Oleo*.

Yohanes, Y.Subyanto.2011. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan (BAPPEKO) Kota Mijekorto.STIKOM Surabaya.



L

A

M

P

I

R

A

N



Kuesioner penelitian

LEMBAR KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh:

Nama : HERLINA
Nim : 105730541515
Jurusan/fakultas : S1 Akuntansi/Ekonomi
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PADA KANTOR WALIKOTA MAKASSAR”.

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/ibu/saudara/l untuk berkenaan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner yang di lampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/ibu/saudara/l sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/ibu/saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/ibu/saudara/l ditempat anda kerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenaan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/ibi/saudara/l, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

HERLINA



KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah

Nama Responden :

Tanggal Pengisian :

Jenis kelamin : laki-laki perempuan

Latar belakan pendidikan :

Ekonomi/Akuntansi

Hukum

Teknik

Sosial

Pendidikan Terakhir :

SLTA/Sederajat

Diploma (D3)

Strata 1 (Sarjana)

Strata 2 (master)

Strata 3 (Doktor)

Jabatan :

Kepala Badan/Dinas Instansi

Sekretaris/kabid/kabag

Kasubid/kasubag/kasie

Lama Bekerja :

1 – 5 tahun

6 – 10 tahun

11 – 15 tahun

16 – 20 tahun

≥ 21 tahun

Usia :



20 – 30 tahun

31 – 40 tahun

41 – 50 tahun

≥ 51 tahun



```

CORRELATIONS
/VARIABLES=PAA1 PAA2 PAA3 SCOR
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

correlations

Correlations

		PAA1	PAA2	PAA3	SCOR
PAA1	Pearson Correlation	1	,233	,896**	,924**
	Sig. (2-tailed)		,104	,000	,000
	N	50	50	50	50
PAA2	Pearson Correlation	,233	1	,233	,533**
	Sig. (2-tailed)	,104		,104	,000
	N	50	50	50	50
PAA3	Pearson Correlation	,896**	,233	1	,924**
	Sig. (2-tailed)	,000	,104		,000
	N	50	50	50	50
SCOR	Pearson Correlation	,924**	,533**	,924**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=PAA1 PAA2 PAA3
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.

```

reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,741	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAA1	3,66	,626	50
PAA2	3,72	,454	50
PAA3	3,66	,626	50

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PAA1	7,38	,730	,780	,362
PAA2	7,32	1,487	,239	,945
PAA3	7,38	,730	,780	,362

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,04	1,958	1,399	3

CORRELATIONS
 /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
 TOTAL_X1
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,233	,896**	,924**
	Sig. (2-tailed)		,104	,000	,000
	N	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	,233	1	,233	,533**

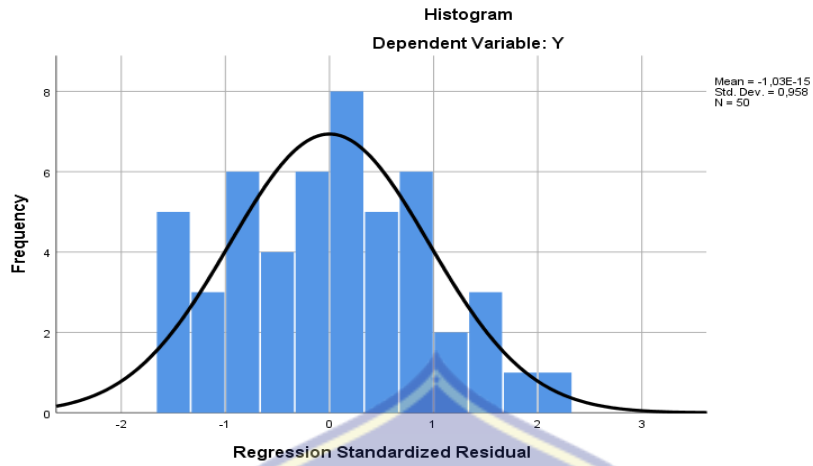
	Sig. (2-tailed)	,104		,104	,000
	N	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	,896**	,233	1	,924**
	Sig. (2-tailed)	,000	,104		,000
	N	50	50	50	50
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,924**	,533**	,924**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

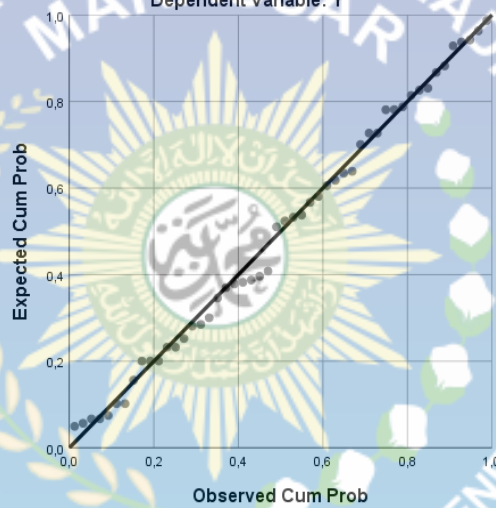
Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,223	,886**	,917**
	Sig. (2-tailed)		,120	,000	,000
	N	50	50	50	50
X4.2	Pearson Correlation	,223	1	,223	,537**
	Sig. (2-tailed)	,120		,120	,000
	N	50	50	50	50
X4.3	Pearson Correlation	,886**	,223	1	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000	,120		,000
	N	50	50	50	50
TOTAL_X4	Pearson Correlation	,917**	,537**	,917**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



Warning # 849 in column 23. Text: in_ID
The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.
It could not be mapped to a valid backend locale.

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 5968 days.

```
REGRESSION  
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA  
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
/NOORIGIN  
/DEPENDENT Y  
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4  
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)  
/RESIDUALS NORMPROB(ZRESID)  
/SAVE RESID.
```



RIWAYAT HIDUP



Herlina lahir di Bontoloe, Sulawesi Selatan pada Tanggal 25 Juni 1996 merupakan anak ke 4 dari 4 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Kaharuddin dan Ibu Nurung, penulis berkembang di Indonesia dan Beragama Islam adapun Riwayat Pendidikan Penulis menempuh Sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 196 Bontoloe dan tamat ada tahun 2008, Kemudian Terdaftar sebagai Siswi sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Arungkeke dan tamat 20011, kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2011 di SMKN 1 JENEPONTO dan tamat 2014. Kemudian Pada Tahun 2015 Penulis Terdaftar sebagai Mahasiswi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis DI Universitas Muhammadiyah Makassar dan Menyelesaikan Studi di Tahun 2019 pada bulan Oktober.